



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 106 TAHUN 2022**

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN PASIRWANGI TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Kecamatan Pasirwangi Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Pasirwangi Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN PASIRWANGI TAHUN 2023.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Renja Kecamatan Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN

Pasal 2

Renja Kecamatan Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2023 dan hasil evaluasi Renja Kecamatan tahun lalu.

Pasal 3

- (1) Renja Kecamatan Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja Kecamatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja Kecamatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Kecamatan Tahun Anggaran 2023.

BAB III**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2022 NOMOR 106**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 106 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KAJIAN
KECAMATAN PASIRWANGI
TAHUN 2023

BAB I

1.1 Latar Belakang

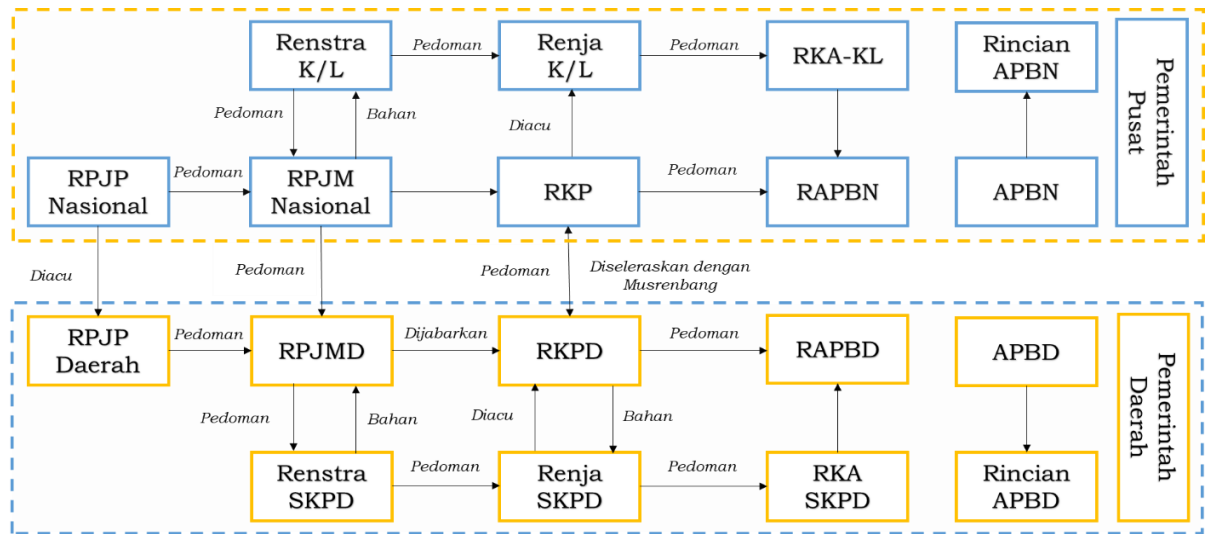
Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dokumen RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun keempat dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 untuk menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan kebijakan nasional maupun perkembangan keadaan daerah yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah.

Renja Kecamatan Pasirwangi Tahun 2023 disusun dengan tahapan meliputi persiapan penyusunan Renja, penyusunan rancangan awal Renja, penyusunan rancangan Renja, perumusan rancangan akhir Renja. Sesuai Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah, bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah. Seiring diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka penyusunan RKPD Tahun 2023 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2023.

Gambar 1.1
Hubungan Antara Renja Terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Lain



Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Renja SKPD/Kecamatan Pasirwangi Tahun 2023 berpedoman pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 dalam menyempurnakan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Renja Perangkat Daerah. Renja SKPD/Kecamatan Pasirwangi Tahun 2023 juga berdasarkan pada Renstra Perangkat Daerah, program pembangunan Daerah, serta perkembangan permasalahan pembangunan Daerah lainnya.

bahwa Renja SKPD/Kecamatan Pasiarawngi merupakan pedoman untuk penyusunan Rancangan APBD, sehingga memiliki konsekuensi bahwa rencana kerja program, dan kegiatan dalam RKPD harus benar-benar terukur dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan perangkat kerja daerah, Rencana kerja diharapkan tidak lagi memuat daftar panjang usulan kegiatan Perangkat Daerah, akan tetapi dapat lebih bersifat spesifik (*Specific*), terukur (*Measurable*), dapat dicapai (*Achievable*), sesuai atau relevan (*Relevant*), dan tepat waktu (*Time-bond*). Disamping itu, nilai keberlanjutan dalam pelaksanaan pembangunan penting untuk diwujudkan, agar dapat mencapai dan mempertemukan kebutuhan antar ruang dan waktu sekaligus menuntaskan upaya pemecahan masalah secara integral dan komprehensif. Renja SKPD/Kecamatan Pasirwangi. Tahun 2023 juga disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Garut menghadapi tantangan dalam penanganan pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, penyebaran pandemi COVID-19 telah menjadi masalah kesehatan dunia, dan hingga saat ini masih terdapat tanda-tanda penyebarannya. Pandemi COVID-19 tahun 2021 sudah terkendali pada level yang rendah, diharapkan mulai bisa lepas dari tekanan pandemi COVID-19. Oleh sebab itu arah kebijakan dalam RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 difokuskan pada upaya promosi, pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi, rekonstruksi dampak pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial, dan penanggulangan pandemi COVID-19 secara komprehensif. Penyusunan RKPD Tahun 2023 memuat pula gambaran umum, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, yang diperkirakan akan mengalami transformasi menuju keseimbangan baru (*new normal*) pasca COVID-19.

Pandemi COVID-19 telah memberikan banyak pelajaran tentang pentingnya mencegah lonjakan kasus di masa depan. Masa epidemi saat ini telah membawa perubahan besar pada semua aspek kehidupan, termasuk yang berkaitan dengan teknologi. Epidemi bukan hanya ujian, tetapi juga peluang baru. Asumsi yang digunakan dalam pembangunan daerah tahun 2023 yaitu :

- a. Masyarakat diharapkan sudah dapat hidup berdampingan dengan COVID-19 seiring dengan adanya vaksin, serta terbentuknya *herd- immunity*.
- b. Transaksi digital menjadi preferensi masyarakat dalam bertransaksi jual beli.
- c. Pemanfaatan program relaksasi kredit berjalan optimal, serta upaya pemulihan ekonomi nasional sudah berjalan dengan baik, termasuk sudah kembali berjalannya proyek-proyek pembangunan infrastruktur.
- d. Seluruh aktivitas masyarakat sudah berjalan normal namun tetap menerapkan protokol kesehatan pada semua lini (*new normal*).

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Garut, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”**, serta Misi ke 2 RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu “Mewujudkan pelayanan publik

yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih”. Kecamatan menempati kedudukan yang strategis karena diberikan kewenangan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Otonomi Daerah (bersifat delegatif) dan pengemban tugas khusus pemerintahan (bersifat atributif).

Disamping Camat melaksanakan pelimpahan delegasi tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum *Pemerintahan* yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
8. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
9. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
10. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
11. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
12. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
13. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
14. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

15.

Hasil pembangunan yang diinginkan tersebut akan tercapai dengan optimal apabila ada perencanaan yang terintegrasi dan bersinergi pada setiap lapis pelaku pembangunan. Sejalan dengan itu untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan setiap tahun nya maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 RKPD Tahun 2023, proses penyusunan Renja Kabupaten Garut Tahun 2023

dilakukan melalui beberapa tahapan dan di tentukan Tema Pembangunan Tahun 2023 yaitu “ **Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan daya saing daerah serta Penguatan Demokrasi untuk kesejahteraan Masyarakat**” yang di turunkan ke dalam Program dalam Rencana Kerja SKPD/Kecamatan Pasirwangi Tahun 2023 sebagai bahan dari perencanaan pembangunan Kabupaten Garut dan penjabaran tahun keempat dari rencana pembangunan jangka menengah, disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD/Kecamatan dan sebagai bahan penyusunan RKPD/Renja Kabupaten Garut.

Selanjutnya berdasarkan rencana strategis tersebut diimplementasikan melalui tahapan-tahapan perencanaan kegiatan atau dengan kata lain dengan menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Kecamatan Pasirwangi. tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851)
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);

16. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat Corona Virus Disease (COVID-19);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 581);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 27. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 505);
 28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 29. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 38);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019- 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019

- Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 6).
 36. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
 37. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 102 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor 26);
 38. Peraturan Bupati Garut Nomor 111 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 76);
 39. Peraturan Bupati Garut Nomor 208 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut Tahun 2019-2024;
 40. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 38).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pasirwangi Tahun 2023 adalah memberikan arahan penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Pasirwangi guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Garut maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pasirwangi Tahun 2023 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perencanaan, pelaksanaan tugas peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Memberikan kemudahan dalam melakukan sinkronisasi, dan sinergitas antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Garut khususnya Kecamatan Pasirwangi;
3. Membuat acuan perencanaan dan penganggaran yang memuat penjabaran Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat sesuai dengan pendelegasian kewenangan dari Bupati.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pasirwangi Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Memuat penjelasan tentang maksud dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.3.2 Tujuan

Memuat penjelasan tentang tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu;

2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

Sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Kecamatan Pasirwangi sudah disahkan.

2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Sub bab ini memuat kajian pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi kecamatan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan Awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III Tujuan dan Sasaran.

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional;

Telaahan terhadap kebijakan Nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal : Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, Dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

Berisikan penjelasan mengenai total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan dan penganggaran tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Pasirwangi. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pasirwangi ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Pasirwangi selama tahun 2021 dan tahun berjalan 2022 serta perkiraan target anggaran Tahun 2023.

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pasirwangi Tahun 2021 antara lain

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yaitu :

- 1) Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- 2) Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yaitu :
 - 1) Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 2) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum yaitu :
 - 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yaitu :
 - 1) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa yaitu :
 - 1) Kegiatan Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Pasirwangi Tahun 2020 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2020 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
Pada Perangkat Daerah Kecamatan Pasirwangi dalam pelaksanaan Renja 2021 dari 13 Kegiatan terdapat 10 (sepuluh) Kegiatan yang target

kinerja hasil/keluaran tidak memenuhi target kinerja, antara lain :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (99,72%)
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (96,97%)
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (98,37%)
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (98,76%)
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (86,25%)
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (79,89%)
7. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (93,16%)
8. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (65,06%)
9. Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (71,03%)
10. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (93,78%)

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

No	Kegiatan	Tahun 2021		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.723.092.301	5.549.381.603	99,72
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000	49.860.525	99,72
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	49.860.525	
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.257.112.701	2.149.631.817	95,23
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.237.575.101	2.132.945.217	
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan	19.537.600	16.686.600	

	Keuangan Akhir Tahun SKPD			
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	207.716.900	204.338.000	98,37
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.160.200	9.160.000	
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.130.400	109.220.900	
	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.645.300	13.645.300	
	4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.631.400	9.162.200	
	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.269.600	3.269.600	
	6. Fasilitas Kunjungan Tamu	18.720.000	18.720.000	
	7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41.160.000	41.160.000	
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.074.998.000	3.037.086.450	98,76
	1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	74.998000	70.400000	
	2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000.000	2.966.686.450	
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.350.200	27.041.536	86,25
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.920.000	6.301.536	
	2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.990.000	2.300.000	
	3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.440.200	18.440.000	
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.914.500	81.423.275	79,89
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.100.000	2.444.100	

	2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80.814.500	78.979.175	
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	206.447.100	187.417.700	90,78
1	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	188.947.100	176.041.500	93,16
	1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	17.500.000	11.376.200	65,06
	1 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	17.500.000	11.376.200	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	206.447.100	187.417.700	90,78
9	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	29.999.900	21.309.900	71,03
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	29.999.900	21.309.900	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	109.976.400	103.136.400	93,78
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	109.976.400	103.136.400	93,78
10	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	109.976.400	103.136.400	93,78

Sumber : Kasubag Keuangan dan BMD Tahun 2021

2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Pasirwangi dalam pelaksanaan Renja 2021 dari 13 Kegiatan terdapat 3 (tiga) Kegiatan (100%) yang target

kinerja hasil/keluaran memenuhi target kinerja, antara lain :

1. Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara RepublikIndonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2. Kegiatan Kegiatan Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

No	Kegiatan	Tahun 2021		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	63.743.500	63.743.500	100
1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
	1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara RepublikIndonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	63.743.500	63.743.500	100
2	Kegiatan Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	42.059.800	42.059.800	100
II	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	19.378.900	19.378.900	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Kegiatan Peningkatan	19.378.900	19.378.900	
1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	19.378.900	19.378.900	100

Sumber : Kasubag Umum dan BMD Tahun 2021

- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada tahun anggaran 2021, tidak ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja

2021 Perangkat Daerah Kecamatan Pairwangi

- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Adapaun Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, antara lain :

- a. Adanya kesalahan kode rekening pada jenis kegiatan, sehingga tidak dapat mencairkan anggaran sebagaimana yang telah direncanakan, contohnya seperti pada kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, ada anggraan yang tidak terserap karena salah kode rekening;
 - b. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik kecamatan/desa;
 - c. Adanya efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan, walaupun penyerapan anggaran tidak 100% tetapi kegiatan tetap berjalan;
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pasirwangi adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pasirwangi Tahun 2020 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Pasirwangi pada umumnya.
 - b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pasirwangi berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Pasirwangi.
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatan antara lain :
- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
 - b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan dan Desa.

2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Renstra Perangkat Daerah merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten. Oleh karena itu Renstra Kecamatan Pasirwangi merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Pasirwangi selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut.


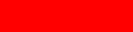


Adapun capaian Renstra Kecamatan Pasirwangi tahun lalu (tahun 2021) seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Pasirwangi
Kabupaten Garut Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kete	
a	B	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	1.1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,5	Triwulan 2	81.5	84,44	103,60		
						Kondisi Akhir (F)		84,44	103,60		
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	2.1	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan			Triwulan 4	65	70	110.46		
						Kondisi Akhir (F)		70	110.46		
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	3.1	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	%	85	Triwulan 1		80	80	94,11	
						Kondisi Akhir (F)		80	94,11		
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	4.1	Nilai SAKIP Kecamatan			Triwulan 4		B	BB	100	
						Kondisi Akhir (F)		BB	100		

Sumber : Sekretariat Tahun 2021

Keterangan

Warna	Prosentase	Keterangan
	n/a	Tidak Ada Target
	< 100%	Tidak Tercapai
	= 100%	Tercapai
	> 100%	Melebihi Target

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa :

1. Dari 4 (empat) sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja Kecamatan .Pasirwangi Tahun 2021, tidak ada sasaran dan indikator kinerja yang pada kondisi akhir tidak mencapai target.
2. Sasaran dan Indikator kinerja yang pada kondisi akhir mencapai target 100% sebanyak 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dengan indikator kinerja predikat sakiپ kecamatan.
3. Sasaran dan Indikator kinerja yang pada kondisi akhir melebihi target 100% ada 2 (dua) Sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja yaitu Sasaran Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan dengan Indikator Sasaran Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dimana dari target 100% pencapaiannya sampai 103, 60%. Dan sasaran meningkatnya kualitas penyelenggarann Pemerintahan Tingkat Kecamatan dengan Indikator Sasaran Nilai SiNergitas Kinerja Kecamatan dimana dari target 100% pencapaiannya sampai 110,46 %
4. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target sasaran dan indikator kinerja, adalah karena sasaran dan indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran. Disamping itu sebagian sasaran dan indikator kineja yang mencapai target dan melebihi target adalah sasaran dan indikator kinerja yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Dikarenakan semua indikator kinerja yang hingga akhir tahun anggaran 2021 mencapai 100% atau lebih dari yang direncanakan maka berimplikasi terhadap tercapainya target capaian Renstra Perangkat Daerah 2019-2024 pada tahun ke 1 pelaksanaan Renstra Kecamatan Pasirwangi. Dengan tercapainya target capaian Renstra Perangkat Daerah 2020-2021 sesuai dengan yang direncanakan, maka tidak perlu adanya penyesuaian target capaian pada Renstra Perangkat Daerah 2019-2024.

Evaluasi Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Pasirwangi selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dan tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kabupaten Garut

Kecamatan Pasirwangi

T-C.29

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan(Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	1				KECAMATAN		6.194.697.901	2.998.781.176	6.194.697.901	5.986.427.803	97	6.194.697.901	15.179.906.880	2,45
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		5.723.092.301	2.889.927.426	5.723.092.301	5.549.381.603	97	5.723.092.301	14.162.401.330	2,47
7	1	1	02.01		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		50.000.000	5.000.000	50.000.000	49.860.525	100	50.000.000	104.860.525	2,10
7	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	50.000.000	5.000.000	50.000.000	49.860.525	100	50.000.000	104.860.525	2,10
7	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.257.112.701	2.026.685.426	2.257.112.701	2.149.631.817	95	2.257.112.701	6.433.429.944	2,85
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	2.237.575.101	2.026.685.426	2.237.575.101	2.132.945.217	95	2.237.575.101	6.397.205.744	2,86
7	1	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19.537.600		19.537.600	16.686.600	85	19.537.600	36.224.200	1,85
7	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		355.553.800	194.052.000	355.553.800	348.796.000	98	355.553.800	898.401.800	2,53

7	1	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	-	-	-	0		-	-	
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		207.716.900	115.686.000	207.716.900	204.338.000	98	207.716.900	527.740.900	2,54
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.160.200	8.845.000	9.160.200	9.160.000	100	9.160.200	27.165.200	2,97
7	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.130.400	48.551.000	112.130.400	109.220.900	97	112.130.400	269.902.300	2,41
7	1	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.645.300	9.125.000	13.645.300	13.645.300	100	13.645.300	36.415.600	2,67
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.631.400	8.845.000	9.631.400	9.162.200	95	9.631.400	27.638.600	2,87
7	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Surat Kabar	3.269.600	3.000.000	3.269.600	3.269.600	100	3.269.600	9.539.200	2,92
7	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah pelaksanaan fasilitasi kunjungan tamu	18.720.000	9.000.000	18.720.000	18.720.000	100	18.720.000	46.440.000	2,48
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41.160.000	28.320.000	41.160.000	41.160.000	100	41.160.000	110.640.000	2,69
7	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3.074.998.000	482.261.000	3.074.998.000	3.037.086.450	99	3.074.998.000	6.594.345.450	2,14
7	1	1	02.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	74.998.000	372.000.000	74.998.000	70400000		74.998.000	517.398.000	6,90
7	1	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah item Pengadaan Mebel		36.500.000					36.500.000	

7	1	1	02.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah luas tanah untuk aset kecamatan	3.000.000.000		3.000.000.000	2.966.686.450		3.000.000.000	5.966.686.450	1,99
7	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralata dan Mesin Lainnya	Jumlah luas tanah untuk aset kecamatan							-	
7	1	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor		73761000					73.761.000	
7	1	1	02.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Tanah Kantor							-	
7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		31.350.200	23.700.000	31.350.200	27.041.536	86	31.350.200	82.091.736	2,62
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.920.000	6.000.000	7.920.000	6.301.536	80	7.920.000	20.221.536	2,55
7	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara	4.990.000	4.600.000	4.990.000	2.300.000	46	4.990.000	11.890.000	2,38
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pengadaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	18.440.200	13.100.000	18.440.200	18.440.000	100	18.440.200	49.980.200	2,71
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		101.914.500	236.595.000	101.914.500	81.423.275	80	101.914.500	419.932.775	4,12
7	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit pembayaran STNK dan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	21.100.000	10.225.000	21.100.000	2.444.100	12	21.100.000	33.769.100	1,60
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan / Rehab Gedung	80.814.500	226.370.000	80.814.500	78979175	98	80.814.500	386.163.675	4,78
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		206.447.100	88.468.750	206.447.100	187.417.700	91	206.447.100	482.333.550	2,34
7	1	2	02.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		188.947.100	86.218.750	188.947.100	176.041.500	93	188.947.100	451.207.350	2,39

7	1	2	02.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Kepemudaan dan Olah Raga	188.947.100	86.218.750	188.947.100	176.041.500	93	188.947.100	451.207.350	2,39
						Jumlah Kegiatan Pembinaan Teknis Pelaksanaan Perlombaan Desa								
						Jumlah Kegiatan Upacara Hari Besar								
						Jumlah Monitoring Bantuan Pemerintah Non Tunai								
						Jumlah Monitoring Kegiatan Proyek Pembangunan								
						Jumlah Monitoring Pencapaian Target PBB di Tiap Desa								
						Jumlah Penanganan Percepatan Penanggulangan COVID-19								
7	1	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		17.500.000	2.250.000	17.500.000	11.376.200	65	17.500.000	31.126.200	1,78
7	1	2	02.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Sesuai Prosedur	17.500.000	2.250.000	17.500.000	11.376.200	65	17.500.000	31.126.200	1,78
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		49.378.800	0	49.378.800	40.688.800	82	49.378.800	90.067.600	1,82
7	1	3	02.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		29.999.900	0	29.999.900	21.309.900	71	29.999.900	51.309.800	1,71
7	1	3	02.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah dokumen RPTK	29.999.900		29.999.900	21.309.900	71	29.999.900	51.309.800	1,71

7	1	3	02.01	3	Peningkatan Efektipitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektipitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat		8.550.000							8.550.000	
7	1	3	02.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		19.378.900	0	19.378.900	19.378.900	100	19.378.900	38.757.800	2,00		
7	1	3	02.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				0			-			
7	1	3	02.03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	19.378.900		19.378.900	19.378.900	100	19.378.900	38.757.800	2,00		
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		63.743.500	5.135.000	63.743.500	63.743.500	100	63.743.500	132.622.000	2,08		
7	1	4	02.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		63.743.500	5.135.000	63.743.500	63.743.500	100	63.743.500	132.622.000	2,08		
7	1	4	02.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	63.743.500	5.135.000	63.743.500	63.743.500	100	63.743.500	132.622.000	2,08		
7	1	4	02.02		Koordinasi Penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepla Daerah		109.976.400	2.335.000	109.976.400	103.136.400	94	109.976.400	215.447.800	1,96		
7	1	4	02.01	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegaaan Paeraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	2.335.000	-	0		-	2.335.000			
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		109.976.400	-	109.976.400	103.136.400	94	109.976.400	213.112.800	1,94		
7	1	5	02.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		109.976.400	-	109.976.400	103.136.400	94	109.976.400	213.112.800	1,94		

7	1	5	02.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dn Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional								-	
7	1	5	02.01	2	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek. Sosilisasi. Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional								-	
7	1	5	02.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Forum Pimpinan Kecamatan	109.976.400		109.976.400	103.136.400	94	109.976.400	213.112.800	1,94	
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		42.059.800	15.250.000	42.059.800	42.059.800	100	42.059.800	99.369.600	2,36	
7	1	6	02.01		Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		42.059.800	15.250.000	42.059.800	42.059.800	100	42.059.800	99.369.600	2,36	
7	1	6	02.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Rapat Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	-	-	0		-	-		
7	1	6	02.01	4	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Koordinasi dn Sosialisasi Penerapan dan Penegakan PERDA	42.059.800		42.059.800	42.059.800		42.059.800	84.119.600	2,00	
7	1	6	02.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Ketentrman dan Ketertiban Umum							-		
7	1	6	02.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Penyusunan Perencanaan Pembangunan	0	15250000	0				15.250.000		
7	1	6	02.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa								-		
TOTAL							6.194.697.901	2.998.781.176	6.194.697.901	5.986.427.803	97	6.194.697.901	15.179.906.880	2,45	

Sumber : Sekretariat

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Pasirwangi sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel. 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan .Pasirwangi Kabupaten Garut

T-C.30												
NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Proyeksi				Catatan
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Analisis
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	Nilai SKM			83	83.50.00	84	84.50.00	85	83	84	84.50	
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan			7,32	8	8,25	8,5	9	8	8,25	8,5	
3	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Nilai/Predikat SAKIP			B	B	B	B	B	B	B	B	

Sumber Renstra Perubahan 2019-2024

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut pada tahun 2021, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis sebagai berikut.

1. Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, penanganan stunting, penurunan Angka Kematian Ibu, penanganan Bencana Alam dan Non Alam;
2. Peningkatan Pelayanan Publik dan penguatan demokrasi, moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender, kekerasan pada perempuan dan pemenuhan hak anak;
3. Peningkatan Kapasitas SDM
4. Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial;
5. Penanganan kebencanaan baik alam maupun non alam
6. Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya;

Dalam rangka menyelesaikan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pasirwangi ditentukan langkah-langkah penting yaitu sebagai berikut :

1) Pemanfaatan

Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Garut;

2) Optimalisasi

Partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial*

Responsibility (CSR), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3) Pelayanan Prima.

Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Garut yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur yang profesional dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk menunjang dalam pelaksanaan Pelayanan Prima terhadap masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD,

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Pasirwangi serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wilayah Kecamatan Pasirwangi (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan

penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Pasirwangi berdasarkan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di.

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran tahun 2023 yang diusulkan Kecamatan Pasirwangi sebesar Rp. 7.712.220.417-.

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Pasirwangi diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

- a. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan dalam RKPD 2023 Kecamatan Pasirwangi mengusulkan 6 (enam) Program dengan 17 (tujuh belas) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) Sub Kegiatan.
- b. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting Program dan kegiatan pada Kecamatan Pasirwangi mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel T-C.31 sebagai berikut :

Tabel. 2.6
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Garut

Nama SKPD : Kecamatan Pasirwangi

T-C.31

NO					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi				
7	1	1	02.01		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi				Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi				
7	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	5.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	5.500.000	
7	1	1	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100 %	5.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100 %	5.500.000	
7	1	1	02.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100 %	5.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100 %	5.500.000	
7	1	1	02.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100 %	5.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100 %	5.500.000	
7	1	1	02.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100 %	5.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100 %	5.500.000	-

7	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 %	5.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 %	5.500.000	
7	1	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.500.000	
7	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi			2.728.460.637	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi			2.728.460.637	
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	2.700.960.637	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	2.700.960.637	
7	1	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Peny	100 %	27.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Peny	100 %	27.500.000	
7	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				19.800.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				19.800.000	
7	1	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 %	19.800.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 %	19.800.000	
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi			233.527.250	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi			233.527.250	
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 %	10.076.220	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 %	10.076.220	
7	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 %	100.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 %	100.000.000	
7	1	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 %	12.145.375	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 %	12.145.375	

7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100 %	11.079.695	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100 %	11.079.695	
7	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100 %	3.993.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100 %	3.993.000	
7	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	100 %	23.287.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	100 %	23.287.000	
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	55.915.200	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	55.915.200	
7	1	1	02.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 %	17.030.760	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 %	17.030.760	
7	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi			3.073.886.640	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi			3.073.886.640	
7	1	1	02.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100 %	30.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100 %	30.000.000	
7	1	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100 %	663.273.600	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100 %	663.273.600	
7	1	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 %	22.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 %	22.000.000	
7	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 %	33.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 %	33.000.000	
7	1	1	02.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 %	2.325.613.040	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 %	2.325.613.040	

7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi			35.990.020	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi			35.990.020	
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 0	9.583.200	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 0	9.583.200	
7	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 0	6.122.600	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 0	6.122.600	
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 0	20.284.220	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 0	20.284.220	
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi			739.310.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi			739.310.000	
7	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100 %	23.210.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100 %	23.210.000	
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 %	716.100.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 %	716.100.000	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi			201.146.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi			201.146.000	
7	1	2	02.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				152.900.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				152.900.000	
7	1	2	02.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	152.900.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	152.900.000	
7	1	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				48.246.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				48.246.000	

7	1	2	02.02	1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	100 %	48.246.000	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	100 %	48.246.000	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi			137.693.500	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi			137.693.500	
7	1	3	02.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi			83.037.400	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi			83.037.400	
7	1	3	02.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100 %	33.037.400	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100 %	33.037.400	
7	1	3	02.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	50.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	50.000.000	
7	1	3	02.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				20.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				20.000.000	
7	1	3	02.03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100 %	20.000.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100 %	20.000.000	
7	1	3	02.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)				21.226.100	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)				21.226.100	
7	1	3	02.05	2	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	100 %	21.226.100	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	100 %	21.226.100	
7	1	3	02.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				13.430.000	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				13.430.000	

7	1	3	02.06	1	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	100 %	13.430.000	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	100 %	13.430.000	
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab. Garut, Pasirwangi, Pasirwangi			171.911.630	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab. Garut, Pasirwangi, Pasirwangi			171.911.630	
7	1	4	02.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Garut, Pasirwangi, Pasirwangi			125.645.850	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Garut, Pasirwangi, Pasirwangi			125.645.850	
7	1	4	02.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100 %	70.645.850	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100 %	70.645.850	
7	1	4	02.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Garut, Pasirwangi, Pasirwangi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100 %	55.000.000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Garut, Pasirwangi, Pasirwangi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100 %	55.000.000	
7	1	4	02.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				46.265.780	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				46.265.780	
7	1	4	02.02	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100 %	46.265.780	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100 %	46.265.780	

7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi			225.654.110	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi			225.654.110	
7	1	5	02.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi			225.654.110	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi			225.654.110	
7	1	5	02.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 %	49.677.870	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 %	49.677.870	
7	1	5	02.01	2	Fasilitasi. Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek. Sosialisasi. Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi. Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek. Sosialisasi. Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 %	55.000.000	Fasilitasi. Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek. Sosialisasi. Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi. Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek. Sosialisasi. Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 %	55.000.000	
7	1	5	02.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100 %	120.976.240	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100 %	120.976.240	
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi			106.340.630	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi			106.340.630	
7	1	6	02.01		Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi			106.340.630	Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi			106.340.630	

7	1	6	02.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Garut. Pasirwangi.	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	100 %	36.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Garut. Pasirwangi.	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	100 %	36.000.000	
7	1	6	02.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	100 %	27.892.730	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	100 %	27.892.730	
7	1	6	02.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	100 %	42.447.900	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	100 %	42.447.900	
Jumlah									7.712.220.417	Jumlah				7.712.220.417	

Sumber : Renstra perubahan Tahun 2019-2023

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang telah diterima oleh Pemerintah Kecamatan Pasirwangi melalui Musrenbang Tingkat Kecamatan Pasirwangi mengacu kepada program prioritas daerah, terdiri dari Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Penurunan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan, Peningkatan Kemandirian Ekonomi Lokal, Peningkatan Infrastruktur Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur. Semua usulan tersebut telah kami adopsi dan kami usulkan ke Pemerintah Kabupaten Garut melalui Musrenbang Tingkat Kabupaten Garut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Garut

T-C.32.

No	Prioritas Daerah	Program	Lokasi Desa/Dusun	Volume	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	JUMLA H	PERINGK AT
(1)	(2)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Pelayanan Jemput Bola Perekaman dan Penerbitan KTP elektrik	Pelayanan Jemput Bola Perekaman dan Penerbitan KTP elektrik	Desa Padasuka		7,500,000	Disduk Capil		
2	Bantuan Insentif Guru PAUD	Bantuan Insentif Guru PAUD	RW 01,05,07 Ds.Padasuka		10,000,000	Dinas Pendidikan		
3	Pembangunan Jamban/MCK Sekolah	Pembangunan Jamban/MCK Sekolah	Kp. Sukamulya RW 05 Ds.Padasuka		30,000,000	Dinas Pendidikan		
4	Bantuan Insentid Guru Ngaji	Bantuan Insentid Guru Ngaji	10 RW/28RT Ds.Padasuka	37 Orang	17,500,000	Sekretariat Daerah/Pemerint ahan Kesra		
5	Pembangunan Sekretariat RW/RT	Pembangunan Sekretariat RW/RT	10 RW/28RT Ds.Padasuka	10 Unit	50,000,000	DPMD		
6	Pelatihan Keterampilan Kelompok PKK	Pelatihan Keterampilan Kelompok PKK	Desa Padasuka	1 Kali	15,000,000	DPMD		
7	Insentif lembaga Desa	Insentif lembaga Desa	Desa Sirnajaya	9 Lembaga	60,000,000	DPMD		
8	Pengadaan Hp lembaga Desa	Pengadaan Hp lembaga Desa	Desa Sirnajaya	9 Lembaga	112,500,000	DPMD		

9	Pengadaan seragam lembaga Desa	Pengadaan seragam lembaga Desa	Desa Sirnajaya	9 Lembaga	22,000,000	DPMD		
10	Pembangunan/Rehab mesjid, Mushola dan Madrasah	Pembangunan/Rehab mesjid, Mushola dan Madrasah	Dusun I, II, III Ds.Sirnajaya	24 Unit	1,320,000,000	BASNAZ		
11	Insentif Guru Ngaji/Paud	Insentif Guru Ngaji/Paud	Dusun I, II, III Ds.Sirnajaya	100 Orang	900,000,000	Dinas Pendidikan-Baznas		
12	Insentif Linmas	Insentif Linmas	Dusun I, II, III Ds.Sirnajaya	18 Orang	162,000,000	DPMD		
13	Pengadaan Mobil Ambulan Desa	Pengadaan Mobil Ambulan Desa	Desa Padamukti	1 Unit	175,000,000			
14	Pelatihan Penanggulangan Bencana	Pelatihan Penanggulangan Bencana	Desa Padamukti	1 Paket	15,000,000	Dinas Sosial		
15	Pembangunan Sekretariat RW	Pembangunan Sekretariat RW	RW 01 s/d 09 Ds.Padamukti	9 Unit	540,000,000	DPMD		
16	Pengadaan Saprasi Olahraga	Pengadaan Saprasi Olahraga	Dusun I-II-III Ds.Padamukti	3 Paket	55,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga		
17	Insentif Guru Ngaji	Insentif Guru Ngaji	Dusun I-II-III Ds.Padamukti	150 Org	112,500,000	Sekretariat Daerah		
18	Rehab Sarana Keagamaan	Rehab Sarana Keagamaan	Dusun I-II-III Ds.Padamukti	9 Paket	150,000,000	Sekretariat Daerah		

19	Pengadaan POS RONDA dan seragam LINMAS di tiap RW	Pengadaan Pos Ronda dan seragam Linmas di tiap RW	Desa Padaawas	10 Unit Posronda	50,000,000	DPMD		
20	Mengadakan Studi Banding dan Bimtek bagi Perangkat Desa dan Lembaga Desa	Mengadakan Studi Banding dan Bimtek bagi Perangkat Desa dan Lembaga Desa	Desa Padaawas	8 Lembaga (Aparatur Pemerintah Desa & Lembaga Desa	100,000,000	DPMD		
21	Pengadaan Kendaraan Kesehatan Di tiap RW	Pengadaan Kendaraan Kesehatan Di tiap RW	Desa Padaawas	10 Unit Kendaraan Roda 4	1,000,000,000	DPMD		
22	Penambahan Insentif Kader Posyandu	Penambahan Insentif Kader Posyandu	10 posyandu Desa Padaawas	50 orang	60,000,000			
23	Pemberian Insentif Guru Ngaji	Pemberian Insentif Guru Ngaji	10 DKM Desa Padaawas	50 Orang	60,000,000	Dinas sosial		
24	Bangunan Dan Mebeler Posyandu	Bangunan Dan Mebeler Posyandu	Kp.Padaawas Kp.Sukasari Kp.Cintasari Kp.Kebonkolot Kp.Sukatinggal Kp.Toblong Kp.Cihurang Kp.Cihurip Desa Padaawas	8 Unit	400,000,000	Dinas Kesehatan		
25	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Barusari	30 Unit	525,000,000	Sekretaris Daerah		

26	Pengadaan Sertifikat Tanah Gratis	Pengadaan Sertifikat Tanah Gratis	Desa Barusari	1 Paket	18,000,000	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
27	Bimtek Kelembagaan	Bimtek Kelembagaan	Desa Barusari	4 x Kegiatan	20,000,000	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
28	Insentif Guru Paud/TK	Insentif Guru Paud/TK	Desa Barusari	20 Orang	60,000,000	Dinas Pendidikan		
29	Pembangunan Sarana Prasarana Keagamaan	Pembangunan Sarana Prasarana Keagamaan	Desa Barusari	15 DKM	300,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman		
30	Pemagaran Halaman Sekolah	Pemagaran Halaman Sekolah	SMPIT Ruyadul Huda Kp. Negla Desa Barusari	30 M	75,000,000	Dinas Pendidikan		
31	Peningkatan Insentif Perangkat dan Lembaga Deaa	Peningkatan Insentif Perangkat dan Lembaga Deaa	Desa Pasirkiamis	150 Orang	100,000,000	DPMD		
32	Sertifikat Tanah Gratis	Sertifikat Tanah Gratis	Desa Pasirkiamis	500 Sertifikat	100,000,000	BPN		
33	Bimbingan teknis Posyandu	Bimbingan teknis Posyandu	Desa Pasirkiamis	45 Orang	55,000,000	DPMD		
34	Pembangunan Gedung Posyandu	Pembangunan Gedung Posyandu	RW 01 s/d RW 07 Ds.Pasirkiamis	7 Unit	560,000,000	DPMD		
35	Pengadaan Alat Praga PAUD	Pengadaan Alat Praga PAUD	Puskesmas Gadog Ds.Pasirkiamis	1 Unit	1,800,000,000	Dinas Kesehatan		
36	Rehabilitasi Madrasah	Rehabilitasi Madrasah	Rw 001 s/d Rw 008 Ds.Pasirkiamis	10 Unit	250,000,000	KEMENAG		

37	Pengadaan Ambulan Desa	Pengadaan Ambulan Desa	Kec.Pasirwangi	1 Unit	8,000,000,000			
38	Pencetakan/Pemutihan Dokumen Sertipikat Tanah	Pencetakan/Pemutihan Dokumen Sertipikat Tanah	Desa Padaasih	1.000 Dokumen	300,000,000			
39	Penegasan Patok Batas Desa	Penegasan Patok Batas Desa	Kec.Pasirwangi	1 Paket Keg.	1,500,000,000			
40	Pembangunan/Rehabilitasi Masjid,Madrasah	Pembangunan/Rehabilitasi Masjid,Madrasah	RW 1- RW 9 Ds.Padaasih	9 Unit	1,800,000,000			
41	Relokasi Lapangan Sepak Bola	Relokasi Lapangan Sepak Bola	RW 6 Ds.Padaasih	1 Paket	1,000,000,000			
42	Pemb./Rehabilitasi Gedung PAUD	Pemb./Rehabilitasi Gedung PAUD	RW 1- RW 9 Ds.Padaasih	5 Unit	600,000,000			
43	Hibah Uang Pembangunan Sekretariat RT/RW	Hibah Uang Pembangunan Sekretariat RT/RW	Desa Sarimukti			DPMD		
44	Bantuan Rutilahu	Bantuan Rutilahu	Desa Sarimukti			KESBANGPOL		
45	Hbah Bumdes Sarimukti	Hbah Bumdes Sarimukti	Desa Sarimukti			DPMD		
46	Pembangunan RKB PUD/SD/SMP/SMK desa sarimukti	Pembangunan RKB PUD/SD/SMP/SMK desa sarimukti	Desa Sarimukti			Dinas Pendidikan		
47	Hibah Sarana Prasarana Olahraga Desa Sarimukti	Hibah Sarana Prasarana Olahraga Desa Sarimukti	Desa Sarimukti			Dispora		

48	Insentif Guru Honorer Ds.Sarimukti	Insentif Guru Honorer Ds.Sarimukti	Desa Sarimukti			Dinas Pendidikan		
49	Pengadaan Smartphone untuk RT	Pengadaan Smartphone untuk RT	Desa Talaga	22 Unit	66,000,000	Diskominfo		
50	Pengadaan Smartphone untuk Kader Posyandu	Pengadaan Smartphone untuk Kader Posyandu	Desa Talaga	9 Unit	27,000,000	Diskominfo		
51	Pengadaan kumputar Lipat untuk Kelembagaan Desa	Pengadaan kumputar Lipat untuk Kelembagaan Desa	Desa Talaga	8 Unit	56,000,000	Diskominfo		
52	Pembanguna Ruang Kelas baru (RKB)	Pembanguna Ruang Kelas baru (RKB)	MI Hidayutul Rohman Ds. Talaga	1 Unit	96,000,000	Dinas Pendidikan		
53	Pembangunan Tribun Lapang Sepak Bola	Pembangunan Tribun Lapang Sepak Bola	Lapang Bola Desa Ds. Talaga	300 M	90,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga		
54	Pembanguna Ruang Kelas baru (RKB)	Pembanguna Ruang Kelas baru (RKB)	MI Bahrul Ihsan Ds. Talaga	1 Unit	96,000,000	Dinas Pendidikan		
55	Program Sertifikat tanah Gratis	Program Sertifikat tanah Gratis	Desa Padamulya	1 Desa	#REF!	BPN		
56	Honorarium Guru Ngaji	Honorarium Guru Ngaji	Desa Padamulya	200 Orang	#REF!	DEPAG		
57	Penambahan BOP Desa	Penambahan BOP Desa	Desa Padamulya	1 Paket	#REF!	DPMD		

58	Pembangunan Desa Wisata	Pembangunan Desa Wisata	Kp. Kawungluwuk Ds. Padamulya	2 Paket	#REF!			
59	Rehab Jemban SISWA	Rehab Jemban SISWA	SDN Padamulya I,II,II, SMP, SMA, MI Ds. Padamulya	10 Unit	#REF!			
60	Pemb. Ruang Kelas Baru	Pemb. Ruang Kelas Baru	PAUD, SD, SMP, SMA, MI Ds. Padamulya	10 Lokal	#REF!			
61	Pelatihan Kapasitas SDM Kades, aparat Desa	Pelatihan Kapasitas SDM Kades, aparat Desa	Desa Karyamekar	Aparatur Pemerintah Desa	16,500,000	DPMD		
62	Peningkatan kapasitas kerja rt & rw	Peningkatan kapasitas kerja rt & rw	Desa Karyamekar	33 Unit	20,500,000	Dinas Perpustakaan & Kearsipan		
63	Pelatihan Kapasitas SDM RT/Rw, Lembaga Desa	Pelatihan Kapasitas SDM RT/Rw, Lembaga Desa	Desa Karyamekar	8 Lembaga (Aparatur Pemerintah Desadan Lembaga Desa)	100,000,000	DPMD		
64	Pengadaan Perlengkapan Sarana Mesjid	Pengadaan Perlengkapan Sarana Mesjid	Desa Karyamekar	11 Unit	110,000,000	Disparbud		
65	Permodalan Penunjang BUMDes	Permodalan Penunjang BUMDes	Desa Karyamekar	-	300,000,000	DPMD		
66	Pembinaan dan Pelatihan Guru Ngaji	Pembinaan dan Pelatihan Guru Ngaji	Desa Karyamekar	83 Orang	30,000,000	Disparbud		

67	Pencetakan Akta Kelahiran Masal	Pencetakan Akta Kelahiran Masal	Desa Pasirwangi	1 Paket	100,000,000	DPMD		
68	Pengadaan Mobil Ambulan Desa	Pengadaan Mobil Ambulan Desa	Desa Pasirwangi	1 Unit	250,000,000	PUPR		
69	Pencetakan KTP	Pencetakan KTP	Desa Pasirwangi	1 unit	200,000,000	DISKOMINFO		
70	Bantuan Bibit Peternakan desa pasirwangi	Bantuan Bibit Peternakan desa pasirwangi	32 RT	3 Klompok	200,000,000	Dinas Peternakan		
71	Bantuan Bibit Unggul Pertanian desa pasirwangi	Bantuan Bibit Unggul Pertanian desa pasirwangi	Desa Pasirwangi	± 2 Unit	100,000,000	DLH		
72	Peningkatan Sarana Pendidikan	Peningkatan Sarana Pendidikan	Desa Pasirwangi		500,000,000	DISDIK		
Bidang Ekonomi								
73	Bantuan Sarana Produksi Pasca Panen	Gapoktan	Desa Padasuka	1 Unit	50,000,000	Dina Pertanian		
74	Pemberian/Bantuan Alat Pasca Panen	Gapoktan	Desa Padasuka	1 Unit	30,000,000	Dina Pertanian		
75	Pembangunan Jaringan Irigasi Desa	Gapoktan	Desa Padasuka	200 Meter	150,000,000	Dina Pertanian		
76	Pengadaan modal kelompok ternak dan Tani	Membantu biaya sehari-hari ,Meingkatkan Teanaga Kerja	Dusun I. II dan III Ds.Sirnajaya	11 Kelompok	165,000,000	Dina Pertanian		

77	Pengadaan modal UMKM	Peningkatan usaha dan pengetahuan dalam perkembangan usaha/wiraswasta	Dusun I. II dan III Ds.Sirnajaya	1 Paket	662,500,000	Dina Koperasi& UMKM		
78	Pengadaan mesin pemotong rumput	Mempermudah pekerjaan/mengemat waktu pekerjaan	8 RW Ds.Sirnajaya	1 Paket	24,000,000	PUPR		
79	Permodalan Usaha Pemuda Produktif	Meningkatkan Produktipitas	Karang Taruna Ds.Padamukti	1 Paket	150,000,000	DPMD		
80	Bantuan Permodalan UMKM	Meningkatkan Permodalan	Dusun I-II-III Ds.Padamukti	80 Orang	350,000,000	Dinas Koperasi dan UMKM		
81	Pemb. Jalan Pertanian	Meningkatkan Perekonomian	RW 07 Ds.Padamukti	750 M	250,000,000	Dinas Pertanian		
82	Pengadaan Mesin Pengolah Kopi	Wirausaha berpotensi menciptakan pekerjaan	Desa Padaawas	3 Unit	75,000,000	Dinas Pertanian		
83	Pemberian Bantuan Modal untuk Kelompok Usaha	Wirausaha berpotensi menciptakan pekerjaan	Desa Padaawas	4 Kelompok	150,000,000	Dinas UKM		
84	Persemaian bibit kopi	penyediaan bibit unggul	Desa Padaawas	2 Lokaso	150,000,000	Dinas Pertanian		
85	Modal Kelompok Ternak Bebek	Kelompok Ternak	Desa Barusari	1 Paket	100,000,000	Dinas Pertanian		
86	Modal Kelompok Ternak Domba	Kelompok Ternak	Desa Barusari	1 Paket	150,000,000	Dinas Pertanian		

87	Simpan Pinjam bagi Warung Kecil	Warung Kecil	Desa Barusari	20 Kelompok	200,000,000	Dinas Koprasi dan UKM		
88	Pengadaan mesin sampah dan pengadaan kendaraan mengangkut sampah (motor)	Menghindari pencemaran lingkungan dan mmenghindari wabah penyakit	Desa Pasirkiamis	6 Unit/6 Lokasi	179,500,000	LH		
89	Mesin Alsitan kultivator, Traktor Kebun.	Meringankan pekerjaan dalam bajak kebun dan sawah.	6 Kelompok Tani Ds.Pasirkiamis	6 Unit	72,000,000	Dinas Pertanian		
90	Bimbingan teknis Pertanian dan peralatannya	Peningkatan produktivitas pertanian dan memperlancar sarana dan prasarana pertanian	15 Kelompok Tani Ds.Pasirkiamis	7 hari	48,000,000	Dinas Pertanian		
91	Pengadaan Mesin Presto Pindang	Peningkatan Prduksi hasil produksi yang berkualitas	RW 6,7,8 Ds.Padaasih	10 Kelompok	1,000,000,000	Disperindag		
92	Bantuan Modal UMKM	Peningkatan Prduksi hasil produksi yang berkualitas	RW 1- RW 9 Ds.Padaasih	20 Kelompok	2,000,000,000	Dinas Koprasi dan UKM		
93	Kursus Menjahit Yayasan dan Pesantren	Pemberdayaan wirausaha	RW 4,5,6,9 Ds.Padaasih	5 Paket Keg	400,000,000	Disperindag		
94	Jalan Usaha Tani	Memperlancar mobilitas para petasi	Desa Sarimukti	1 Km	150,000,000	Dinas Pertanian		
95	Jaringan Irigasi Usaha Tani	Meningkatkan produksi pertanian	Desa Sarimukti	I Unit	356,000,000	Dinas Pertanian		

96	Bantuan Sarana Prasarana Peternakan Domba Garut	Melestarikan khas ternak Domba Garut	Desa Sarimukti	8 Kelompok	130,000,000	Dinas Perikanan & Peternakan		
97	Pengadaan Modal UMKM	Mensejahterakan Masyarakat	Desa Talaga	8 Kelompok	160,000,000	Dinas Koperasi dan UKM		
98	Pengadaan Bibit Jeruk	Mensejahterakan Petani	12 Kelompok	36000 Batang	252,000,000	Dinas Pertanian		
99	Pengadaan Mesin Jahit	Mensejahterakan Masyarakat	Desa Talaga	40 Unit	120,000,000	Disperindag & ESDM		
100	Pengadaan Mesin Jahit	Masyarakat,	Desa Padamulya	50 Unit	450,000,000	Dinsosnakertrans		
101	Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa	Masyarakat Petani	Saluran Irigasi Kp. Ciwedang, Kawungluwuk, Bongkor, Cicara, Gadog, Singkup Ds.Padamulya	2000 M	1,260,000,000	Dinas Pertanian		
102	Penguatan Modal BUMDES	BUMDES MULYA JAYA SEJAHTERA, Masyarakat	Desa Padamulya	1 Paket	650,000,000	DPMD		
103	Pelatihan Pembibitan (Bibit Kentang)	KelompokTani	Desa Karyamekar	8 Kelompok	52,000,000	Dinas Pertanian		
104	Kegiatan daur ulang sampah Organik dan Non Organik	meminimalisir sampah	Desa Karyamekar	100 Orang	16,000,000	Dinas Koperasi dan UKM		
105	Kegiatan Padat Karya Masyarakat	Tambahan penghasilan masyarakat	Desa Karyamekar	Kp Cibeuerum Rt 03 Rt 02	75,000,000	Dinas Perkim		

106	Pengadaan alat UMKM	- Meningkatkan produktifitas sandang, pangan	10 RW	± 10 unit	1,000,000,000	DISPERINDAG		
107	Teknologi Tepat Guna untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi	- Produktifitas pertanian meningkat	32 RT	± 32 unit	320,000,000	Dinas Pertanian		
108	Pengadaan alat mesin jahit	- Meningkatkan penghasilan	32 RT	± 32 unit	320,000,000	Disperindag		
Bidang IPW								
109	Pembangunan Drainase Permukiman	Warga Masyarakat RW 01,02,04	Kp. Cawenekoneng RW 01,02,04	800 Meter	400,000,000	DISPERKIM		
110	Pembangunan Jalan Lingkungan	Lingkungan Warga Masyarakat RW 01,03,04,06 dan 10	Kp. Cawenekoneng RW 01,03,04, Kp. Simpeureum RW 06-10	1 Unit	600,000,000	DISPERKIM		
111	Pengadaan Kendaraan Pengangkut Sampah/Dump Truck	Semua Warga Masyarakat Desa	Kp. Sukamulya RW 05	1 Unit	350,000,000	DLH		
112	Pembangunan Drainase jalan kabupaten	* Penataan lingkungan/Jalan Desa	Dusun III Ds.Sirnajaya	2 KM	600,000,000	PUPR		
113	Pengadaan sarana dan prasarana air bersih	* Kebutuhan bertambah seiring pertumbuhan penduduk	Dusun I. II dan III Ds.Sirnajaya	29 Unit	2,175,000,000	PERKIM		

114	Pengadaan Mesin penghancur sampah/pembakaran	* Meningkatkan kebersihan lingkungan	Dusun I. II dan III Ds.Sirnajaya	8 Unit	288,000,000	LH		
115	Pembangunan Jalan Lingkungan	Menjaga Kebersihan Lingkungan	Dusun I-II-III Ds.Padamukti	1875 M	325,000,000	Dinas Perkim		
116	Pembangunan RUTILAHU	Membantu Warga Miskin	Dusun I-II-III Ds.Padamukti	9 Unit	225,000,000	Dinas Perkim		
117	Pembangunan Hotmix Jalan Desa	Memperlancar Transportasi	Jalan Desa Ds.Padamukti	1.000 Km	750,000,000	Dinas PUPR		
118	Pembangunan EMBUNG DESA	Kebutuhan petani dan pengembangan wisata	Kp.Cihurang Rw 10 Ds.Padaawas	19600 m	199,998,400	Dinas PUPR		
119	Pembangunan TPT dan DRAINASE jalan protokol jalan raya darajat kp sukasari, toblong	Menjaga kerusakan jalan dan kenyamanan pemakai jalan	Kp. Sukasari Rw,05 Kp.Cintasari Rw,02 dan Kp.Kolelega Rw 01 Ds.Padaawas	1500 m	375,000,000	Dinas PUPR		
120	Pembangunan TPT Taman baca sekolah	Kenyamanan siswa dalam membaca buku	SDN Padaawas 03 Kp.Toblong Rw 01 Ds.Padaawas	500 m	400,000,000	Dinas PUPR		
121	Pembangunan Jalan Desa	Jalan Desa	Kp. Padaawas, Kp. Negla dan Kp. Cibaed Ds. Barusari	800 M	300,000,000	Dinas PUPR		
122	Pembangunan Jalan Lingkungan	Masyarakat di lingkungan	Dusun I, Dusun II dan III Ds. Barusari	3000 M	250,000,000	Dinas Perkim		

123	Pembangunan TPT	Tanah Rawan Longsor	Dusun I, Dusun II dan III Ds. Barusari	1.200 M	500,000,000	Dinas Perkim		
124	Pembangunan Rehabilitasi Rutilahu	Membangun/Menta kembali RITILAHU masyarakat kurang mampu	Dusun 1 ,2 dan 3 Ds. Pasirkaimis	200 Unit	4,000,000,000	DISTARKIM		
125	Pembangunan Jalan Lingkungan	Penataan Lingkungan, Kebersihan dan keindahan.	Kp. Ciharemis, Pasirkebon, Burujul, Pasirkiamis, Nyalindung dan Cicurug Ds.Pasirkiamis	3 Km	200,000,000	PUPR		
126	Pembangunan Drainase	Mengantisipasi limbah Air rumah tangga	Kp. Bojong jaya, ciharemis, pasirkebon, pasirkiamis, nyalindung dan cicurug Ds.Pasirkiamis	2,5 Km	250,000,000	PUPR		
127	PavingBlok Jalan Lingkungan	Pembangunan Jalan Lingkungan	RW 1-RW 9 Ds.Padasih	4.000 M	3,000,000,000	PUPR		
128	Pengelolaan Sampah Berbasis Mesin Penghancur/Pemba kar	Kebersihan Lingkungn	RW 1-RW 9 Ds.Padaasih	10 Unit	500,000,000	LH		
129	Pembangunan Drainase Jalan Raya	Pembangunan SaranPrasara Infrastruktur	Jl.Padaasih-Padasuka	3.000 m	2,000,000,000	PUPR		
130	Pembangunan Jalan Lingkungan	Penataan Lingkungan Pemukiman	Desa Sarimukti		150,000,000	Dinas PUPR		

131	Pembanguann TPT Jalan Lingkunagn	Penataan Lingkungan Pemukiman Mengantisipasi Longsor	Desa Sarimukti		150,000,000	Dinas PERKIM		
132	Pembangunan Madrasah	Sarana Keagamaan	Desa Sarimukti		1,502,000,000	Sekretariat Daerah		
133	Pembangunan Tembok Penahan Tanah	Penahan Longsor	Kp. Ciherang RW 07 Ds. Talaga	200 M	180,000,000	Dinas Perkim		
134	Pembangunan Tembok Penahan Tanah	Penahan Longsor	Kp. Talaga Tengah RW 06 Ds. Talaga	500 M	350,000,000	Dinas PUPR		
135	Pipanisasi Air Bersih	Meninhgkatkan Kesehatan Masyarakat	Kp. Talaga Sari RW 01 Ds. Talaga	3000 M	210,000,000	Dinas PUPR		
136	Rutilahu	1. Masyarakat, 2. Kenyamanan dan Kenyamanan	Desa Padamulya	100 Rumah	2,300,000,000	PUPR/PERKIM		
137	Pemb. TPT Jalan Lingkungan RW 01, 05	1. Masyarakat, 2. Mencegah terjadinya longsor, 3. keamanan dan kenyamanan	RW 01 dan RW 05 Desa Padamulya	500 M	1,505,000,000	PUPR/PERKIM		
138	Pengerasan Jalan Desa Kp. Singkup	1. Meningkatkan perekonomian masyarakat, 2. memperlancar transportasi, 3. Masyarakat	Kp. Singkup RW 04 Desa Padamulya	450 M	1,255,000,000	PUPR		
139	Pembangunan TPT	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hunian/Permukiman yang memiliki potensi ekonomi	Kp Cihaneut Atas Rt 02 Rw 04 Ds.Karyamekar	P 2000 m x L 2 m x T 0,30 m	270,000,000	Dinas PERKIM		

140	Rabat Beton Jalan Lingkungan	menjaga kerusakan jalan dan kenyamanan pemakai jalan	Kp Cibeureum Rw 03, Kp Cihaneut Rw 04 , Kp Cipanas Rw 04 Ds.Karyamekar	P 2000 m x L 1,5 m x T 0,10 m	160,000,000	Dinas PERKIM		
141	Pembangunan Sarana TPS	tidak membuang sampah sembarangan	Rw 01,02,03,04,05 & 06 Ds.Karyamekar	6 unit	120,000,000	Dinas PERKIM		
142	Pembangunan TPT	- Mengantisipasi longsor dan erosi	Desa Pasirwangi		150,000,000	PUPR		
143	Draenase Jalan Raya Pasirwangi	- Peningkatan kapasitas dan kualitas Saluran Air	Jln. Raya Pasirwangi - Palnunjuk	± 4000 M	400,000,000	PUPR		
144	Pembangunan Bronjong	- Mengantisipasi longsor dan erosi	Desa Pasirwangi		200,000,000	PUPR		

Sumber : Dokumen Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan Tahun 2022

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pedoman dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta untuk penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, maka Pemerintah Kabupaten Garut dalam menyusun rencana kerja tahun 2023 senantiasa memperhatikan Lima Arahana Utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu:

1. Pembangunan sumber daya manusia, dengan membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan infrastruktur, dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan regulasi, dengan menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan omnibus law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi, dengan memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi ekonomi, dengan melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumberdaya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan pada Lima Arahana Pembangunan diatas, serta dengan mengkaji kondisi sosial masyarakat Kabupaten Garut, maka Prioritas Pembangunan Daerah untuk Tahun 2022, diarahkan pada:

1. Perluasan kesempatan kerja dan lapangan berusaha dalam rangka penurunan angka kemiskinan;

2. Peningkatan kualitas infrastruktur secara merata dalam rangka pengembangan wilayah;
3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak dalam rangka reformasi sosial;
4. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya dalam rangka recovery ekonomi;
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
6. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur; serta
7. Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Atas dasar keselarasan agenda pembangunan dan isu strategis di atas, maka Tema Pembangunan untuk Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat**.

Sejatinya keberhasilan pembangunan Kabupaten Garut merupakan keberhasilan kolektif dari peran aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Garut, tentu saja dengan didukung oleh bantuan dari Pemerintah Provinsi bersama-sama Pemerintah Pusat.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi **Terwujudnya Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera**, maka dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini harus dilakukan secara berkualitas dan lebih produktif sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penentuan program, kegiatan maupun sub kegiatan harus bersifat yang menyentuh masyarakat secara langsung;
2. Peningkatan investasi di daerah, dalam upaya mendorong peningkatan pendapatan asli daerah serta perekonomian masyarakat dan mencari sumber-sumber pembiayaan lain dengan pola kemitraan;
3. Percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung pusat-pusat ekonomi, infrastruktur pedesaan, khususnya untuk mengatasi ketertinggalan wilayah pedesaan agar perekonomian masyarakat bisa berkembang; serta
4. Membangun komitmen seluruh stekholder baik pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah disepakati bersama.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Garut 2019-2024 maka Kecamatan Pasirwangi. mempunyai tujuan :

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Yang Profesioanal dan Amanah
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan

Sedangkan yang menjadi indikator tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Indeks kepuasan masyarakat
2. Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Pasirwangi Tahun 2023 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan .
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (performance) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan tersendiri dan apabila belum tercapai dapat dijadikan pembelajaran untuk memacu meraih prestasi dimasa mendatang. Adapun indikator sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Pasirwangi Tahun 2023 adalah :

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan
3. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan
4. Nilai SAKIP Kecamatan

Untuk lebih jelasnya, tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kinerja Kecamatan Pasirwangi Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Kinerja Kecamatan Pasirwangi
Tahun 2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	Nilai SKM	84
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	8
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	100%
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	B

Sumber : Renstra Perubahan Tahun 2019-2024

3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Pasirwangi merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) Kecamatan di Kabupaten Garut sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Pasirwangi sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan

ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan.

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Pasirwangi diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Garut terpilih. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Pasirwangi merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih.

- Pencapaian SDG's

Sustainable Development Goals merupakan kesepakatan dari negara-negara di dunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara –negara yang ikut menandatangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MDGs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target MDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Pasirwangi diimplementasikan untuk mencapai target – target SDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

- Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Garut. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Pasirwangi. Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun 2023 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukurang yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Pasirwangi diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah Kecamatan Pasirwangi sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Garut memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi

perkembangan perekonomian Kabupaten Garut. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti kerajinan tas dan bendera, dibidang makanan seperti burayot, ranginang, dodol, kerupuk, kerupuk kulit, tahu, dan sejenis makanan lainnya, dibidang peternakan seperti ikan, ayam, domba, serta obyek-obyek pariwisata seperti curug ciharus, curug cimandaracun, terutama wisata situ dan candi cangkung.

Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Pasirwangi melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Jumlah program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Pasirwangi Tahun 2023 adalah 6 (enam) Program dan 14 (empat belas) Kegiatan dan 44 (empat puluh empat) Sub Kegiatan.

2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Pasirwangi sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Pasirwangi dan mencakup semua Desa.

3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan sebesar Rp. 7.712.220.417,-.

Adapun Program Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Pasirwangi pada Tahun 2023 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

1.1.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

1.1.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

1.1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.1.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.4.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.4.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1.4.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1.4.6. Fasilitas Kunjungan Tamu

1.4.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.4.8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.5.1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- 1.5.2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 1.5.3. Pengadaan Mebel
- 1.5.4. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.5.5. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 1.6.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.6.2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.6.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.7.2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 2.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 2.1.1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 2.2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 2.1.2. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 3.1.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 3.1.2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

- 3.2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 3.2.1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
- 3.3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 3.3.1. Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- 3.4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 3.4.1. Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
4. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 4.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 4.1.1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - 4.1.2. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
 - 4.2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 4.2.1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 5.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 5.1.1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,

Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

5.1.2. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

5.1.3. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

6.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

6.1.1. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

6.1.2. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

6.1.3. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

6.1.4. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel T-C.33 berikut ini :

Tabel. 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Garut

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.31.0000 Kecamatan Pasirwangi

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.31.0000 Kecamatan Pasirwangi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Targe t	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1				KECAMATAN							7.712.220.417				8.483.446.460		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							6.869.474.547				7.556.422.003		
7	1	1	02. 01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							38.500.000				42.350.000		
7	1	1	02. 01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan. Pengganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	2 Dokumen	1 tahun	5.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	6.050.000
7	1	1	02. 01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan. Pengganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi	100 %	1 Dokumen	1 tahun	5.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	6.050.000
7	1	1	02. 01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan. Pengganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi	100 %	1 Dokumen	1 tahun	5.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	6.050.000

7	1	1	02.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	1 Dokumen	1 tahun	5.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	6.050.000
7	1	1	02.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	1 Dokumen	1 tahun	5.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	6.050.000
7	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	1 Laporan	1 tahun	5.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	6.050.000
7	1	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	4 Laporan	1 tahun	5.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	6.050.000
7	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.728.460.637					3.001.306.701
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	24 Orang/bulan	1 tahun	2.700.960.637	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	2.971.056.701
7	1	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Peny	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	1 Laporan	1 tahun	27.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	30.250.000
7	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								19.800.000					21.780.000

7	1	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	1 Paket	12 Bulan	19.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	21.780.000
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								233.527.250					256.879.976
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan an Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	1 Paket	1 tahun	10.076.220	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	11.083.842
7	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	1 Paket	1 tahun	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	110.000.000
7	1	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	3 Paket	1 tahun	12.145.375	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	13.359.913
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	2 Paket	1 tahun	11.079.695	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	12.187.665
7	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	8 Dokumen	1 tahun	3.993.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	4.392.300

7	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	1 Laporan	1 tahun	23.287.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	25.615.700
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	1 Laporan	1 tahun	55.915.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	61.506.720
7	1	1	02.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	1 Dokumen	1 tahun	17.030.760	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	18.733.836
7	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								3.073.886.640					3.381.275.304
7	1	1	02.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	1 unit	1 tahun	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	33.000.000
7	1	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	1 unit	1 tahun	663.273.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	729.600.960
7	1	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	1 Paket	1 tahun	22.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	24.200.000

7	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	2 unit	1 tahun	33.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	36.300.000
7	1	1	02.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	1 unit	1 tahun	2.325.613.040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	2.558.174.344
7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								35.990.020					39.589.022
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 0	1 Laporan	1 tahun	9.583.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 0	10.541.520
7	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 0	1 Laporan	1 tahun	6.122.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 0	6.734.860
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 0	1 Laporan	1 tahun	20.284.220	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 0	22.312.642
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								739.310.000					813.241.000
7	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	8 unit	1 tahun	23.210.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	25.531.000

7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	1 unit	1 tahun	716.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	787.710.000
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								201.146.000					221.260.600
7	1	2	02.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								152.900.000					168.190.000
7	1	2	02.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	1 Dokumen	1 tahun	152.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	168.190.000
7	1	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								48.246.000					53.070.600
7	1	2	02.02	1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	4 Dokumen	1 tahun	48.246.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	53.070.600
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								137.693.500					151.462.850
7	1	3	02.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								83.037.400					91.341.140
7	1	3	02.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	7 Lembaga	1 tahun	33.037.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	36.341.140

7	1	3	02.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	1 Laporan	1 tahun	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	55.000.000
7	1	3	02.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								20.000.000					22.000.000
7	1	3	02.03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	4 lembaga	1 tahun	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	22.000.000
7	1	3	02.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)								21.226.100					23.348.710
7	1	3	02.05	2	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	1 Dokumen	1 tahun	21.226.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	23.348.710
7	1	3	02.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan								13.430.000					14.773.000
7	1	3	02.06	1	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	300 Keluarga	1 tahun	13.430.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	14.773.000
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								171.911.630					189.102.793
7	1	4	02.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								125.645.850					138.210.435

7	1	4	02.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	1 Laporan	1 tahun	70.645.850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	77.710.435
7	1	4	02.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	1 Laporan	1 tahun	55.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	60.500.000
7	1	4	02.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								46.265.780					50.892.358
7	1	4	02.02	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	1 Laporan	1 Laporan	46.265.780	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	50.892.358
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								225.654.110					248.223.521
7	1	5	02.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								225.654.110					248.223.521

7	1	5	02.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi	100 %	60 orang	1 tahun	49.677.870	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggar aan Urusan Pemerintaha n Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	54.649.657
7	1	5	02.01	2	Fasilitasi. Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek. Sosialisasi. Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi. Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek. Sosialisasi. Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi	100 %	60 Orang	1 tahun	55.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggar aan Urusan Pemerintaha n Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	60.500.000
7	1	5	02.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi	100 %	1 Dokumen	1 tahun	120.976.240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggar aan Urusan Pemerintaha n Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	133.073.864
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								106.340.630				116.974.693	
7	1	6	02.01		Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								106.340.630				116.974.693	
7	1	6	02.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlahpelaksanaan Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi	100 %	1 Dokumen	1 tahun	36.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	39.600.000

7	1	6	02.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlahpelaksanaan Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi	100 %	1 Dokumen	1 tahun	27.892.730	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	30.682.003
7	1	6	02.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlahpelaksanaan Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi	100 %	1 Dokumen	1 tahun	42.447.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	46.692.690
TOTAL													7.712.220.417				8.483.446.460	

Sumber : Renstra Perubahan Tahun 2019-2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Pasirwangi Tahun 2023 yaitu dengan melaksanakan adalah 6 (enam) Program dan 17 (tujuh belas) Kegiatan dan 44 (empat puluh empat) Sub Kegiatan. Sedangkan jumlah kebutuhan dana untuk membiayai program dan kegiatan rencana kerja tahun 2023 di Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut sebesar Rp. **7.712.220.417,-** (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Belas Rupiah), yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Garut, dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Capaian Program : Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah di Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 100%
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 6.869.474.547,-
- Keluaran :
 - 1. Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 2. Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3. Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 4. Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah
 - 5. Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 7. Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pasirwangi

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Capaian Program : Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 38.500.000,-

Keluaran : 1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
3. Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
5. Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
6. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pasirwangi

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Capaian Program : Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 2.728.460.637,-

Keluaran : 1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
2. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pasirwangi

1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Capaian Program : Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 19.800.000,-

Keluaran : 1. Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pasirwangi

1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 233.527.250,-

Keluaran : 1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan

2. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

3. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

4. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan

5. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

6. Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu

7. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pasirwangi

1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah

- Capaian Program : Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 3.073.886.640,-
- Keluaran : 1. Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
2. Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
3. Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
4. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan.
5. Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
- Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pasirwangi

1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Capaian Program : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 35.990.020,-
- Keluaran : 1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
2. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
3. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
- Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pasirwangi

1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Capaian Program : Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 739.310.000,-

Keluaran : 1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
2. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan .Pasirwangi

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Capaian Program : Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 201.146.000,-

Keluaran : 1. Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan.

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 82 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pasirwangi

2.1 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 152.900.000,-

Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat.

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 82 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pasirwangi

2.2 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Capaian Program : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 48.246.000,-

Keluaran : Jumlah penyusunan SP/SOP pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan.

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 82 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pasirwangi

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Capaian Program : Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 137.693.500,-

Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 90%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pasirwangi

3.1 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 83.037.400,-

Keluaran : Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa

Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 90%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pasirwangi

3.2 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Capaian Program : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 20.000.000,-

Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa

Hasil : Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan dengan target kinerja 90%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pasirwangi

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Capaian Program : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 21.226.100,-

Keluaran : Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan

Hasil : Terlaksananya Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan dengan target kinerja 90%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pasirwangi

3.3 Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Capaian Program : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 13.430.000,-

Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat. Berbangsa. dan Bernegara

Hasil : Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat. Berbangsa. dan

Bernegara dengan target kinerja 90%
Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pasirwangi

Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

4. Capaian Program : Persentase Penanganan Gangguan Trantibum kecamatan Dengan Target 100%
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 171.911.630,-
- Keluaran : 1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 8
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pasirwangi

4.1 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- Capaian Program : Jumlah laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dengan Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 125.645.850,-
- Keluaran : 1. Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri
2. Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama.
- Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 8
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pasirwangi

4.2 Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 46.265.780,-
- Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada.
- Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 8
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pasirwangi

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat Dengan Target Kinerja 100%
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 225.654.110,-
- Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.
- Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 8
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pasirwangi

5.1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Capaian Program : Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 259.640.700,-
- Keluaran : 1. Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan
2. Jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
3. Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam Terkait Covid-19.
- Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 8

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pasirwangi

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Capaian Program : Persentase Desa Berkinerja Baik Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 106.340.630,-

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
2. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
3. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 8

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pasirwangi

6.1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Capaian Program : Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 57.999.090,-

Keluaran : 1. Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
2. Jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan
3. Jumlah Dokumen RPTK
4. Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 8

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pasirwangi

Total Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 7.712.220.417,- (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Belas Rupiah)

Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah yang di imlementasikan ke dalam tujuan dan sasaran Kecamatan Pasirwangi. Dengan dukungan dana yang tersedia diharapkan pelayanan publik yang diselenggarakan akan semakin baik dan semakin berkualitas serta berpengaruh positif pada Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan, Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dan Predikat SAKIP Kecamatan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini ini :

Tabel. 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Garut

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.31.0000 Kecamatan Pasirwangi

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.31.0000 Kecamatan Pasirwangi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Targe t	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1				KECAMATAN							7.712.220.417				8.483.446.460		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							6.869.474.547				7.556.422.003		
7	1	1	02. 01		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							38.500.000				42.350.000		
7	1	1	02. 01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan. Pengganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	2 Dokumen	1 tahun	5.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	6.050.000
7	1	1	02. 01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan. Pengganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi	100 %	1 Dokumen	1 tahun	5.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	6.050.000
7	1	1	02. 01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan. Pengganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi. Pasirwangi	100 %	1 Dokumen	1 tahun	5.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	6.050.000

7	1	1	02.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	1 Dokumen	1 tahun	5.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	6.050.000
7	1	1	02.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	1 Dokumen	1 tahun	5.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	6.050.000
7	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	1 Laporan	1 tahun	5.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	6.050.000
7	1	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	4 Laporan	1 tahun	5.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	6.050.000
7	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.728.460.637					3.001.306.701
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	24 Orang/bulan	1 tahun	2.700.960.637	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	2.971.056.701
7	1	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Peny	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	1 Laporan	1 tahun	27.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	30.250.000
7	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								19.800.000					21.780.000

7	1	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	1 Paket	12 Bulan	19.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	21.780.000
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								233.527.250					256.879.976
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan an Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	1 Paket	1 tahun	10.076.220	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	11.083.842
7	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	1 Paket	1 tahun	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	110.000.000
7	1	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	3 Paket	1 tahun	12.145.375	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	13.359.913
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	2 Paket	1 tahun	11.079.695	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	12.187.665
7	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	8 Dokumen	1 tahun	3.993.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	4.392.300

7	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	1 Laporan	1 tahun	23.287.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	25.615.700
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	1 Laporan	1 tahun	55.915.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	61.506.720
7	1	1	02.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	1 Dokumen	1 tahun	17.030.760	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	18.733.836
7	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								3.073.886.640				3.381.275.304	
7	1	1	02.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	1 unit	1 tahun	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	33.000.000
7	1	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	1 unit	1 tahun	663.273.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	729.600.960
7	1	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	1 Paket	1 tahun	22.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	24.200.000

7	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	2 unit	1 tahun	33.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	36.300.000
7	1	1	02.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	1 unit	1 tahun	2.325.613.040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	2.558.174.344
7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								35.990.020				39.589.022	
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 0	1 Laporan	1 tahun	9.583.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 0	10.541.520
7	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 0	1 Laporan	1 tahun	6.122.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 0	6.734.860
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 0	1 Laporan	1 tahun	20.284.220	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 0	22.312.642
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								739.310.000				813.241.000	
7	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Paiaknva	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	8 unit	1 tahun	23.210.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	25.531.000

7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	1 unit	1 tahun	716.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	787.710.000
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								201.146.000					221.260.600
7	1	2	02.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								152.900.000					168.190.000
7	1	2	02.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	1 Dokumen	1 tahun	152.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	168.190.000
7	1	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								48.246.000					53.070.600
7	1	2	02.02	1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	4 Dokumen	1 tahun	48.246.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	53.070.600
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								137.693.500					151.462.850
7	1	3	02.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								83.037.400					91.341.140
7	1	3	02.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	7 Lembaga	1 tahun	33.037.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	36.341.140

7	1	3	02.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	1 Laporan	1 tahun	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	55.000.000
7	1	3	02.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								20.000.000					22.000.000
7	1	3	02.03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	4 lembaga	1 tahun	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	22.000.000
7	1	3	02.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)								21.226.100					23.348.710
7	1	3	02.05	2	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	1 Dokumen	1 tahun	21.226.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	23.348.710
7	1	3	02.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan								13.430.000					14.773.000
7	1	3	02.06	1	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	300 Keluarga	1 tahun	13.430.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	14.773.000
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								171.911.630					189.102.793
7	1	4	02.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								125.645.850					138.210.435

7	1	4	02.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	1 Laporan	1 tahun	70.645.850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	77.710.435
7	1	4	02.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	1 Laporan	1 tahun	55.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	60.500.000
7	1	4	02.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								46.265.780					50.892.358
7	1	4	02.02	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	1 Laporan	1 Laporan	46.265.780	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	50.892.358
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								225.654.110					248.223.521
7	1	5	02.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								225.654.110					248.223.521

7	1	5	02.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	60 orang	1 tahun	49.677.870	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggar aan Urusan Pemerintaha n Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	54.649.657
7	1	5	02.01	2	Fasilitasi. Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek. Sosialisasi. Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi. Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek. Sosialisasi. Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	60 Orang	1 tahun	55.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggar aan Urusan Pemerintaha n Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	60.500.000
7	1	5	02.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	1 Dokumen	1 tahun	120.976.240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggar aan Urusan Pemerintaha n Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	133.073.864
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								106.340.630				116.974.693	
7	1	6	02.01		Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								106.340.630				116.974.693	
7	1	6	02.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlahpelaksanaan Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	1 Dokumen	1 tahun	36.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	39.600.000

7	1	6	02.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlahpelaksanaan Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	1 Dokumen	1 tahun	27.892.730	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	30.682.003
7	1	6	02.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlahpelaksanaan Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Garut. Pasirwangi.	100 %	1 Dokumen	1 tahun	42.447.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	46.692.690
TOTAL													7.712.220.417					8.483.446.460

BAB V

P E N U T U P

Dengan terjadinya pandemi global COVID-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional sejak tahun 2020. Maka perlu di lakukan strategi perencanaan yang efektif dan berorientasi hasil.

Penyusunan Renja Kecamatan Pasirwangi mengacu pada RKPD Tahun 2023 yang merupakan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam hal ini menjadi dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS, serta rancangan APBD Tahun 2023.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Renja kecamatan Pasirwangi menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan atau triwulanan kepada Bappeda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada akhir Tahun Anggaran 2023, Kecamatan Pasirwangi melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN